

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, belanja modal, serta tingkat partisipasi angkatan kerja setiap tahunnya terjadi perubahan, dimana rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,23 %, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,72%, jumlah penduduk miskin sebesar 0,88%, belanja modal sebesar 2,72%, dan diikuti dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,73%.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan variabel pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk miskin memberikan pengaruh signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama periode 2019-2023. Di sisi lain, belanja modal dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut pada rentang waktu yang sama..

6.2 Saran

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi disarankan untuk mengoptimalkan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan sektor UMKM dengan dukungan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar, serta mendorong investasi di sektor padat karya seperti industri pengolahan dan pertanian modern. Selain itu, untuk menekan angka pengangguran yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah penduduk miskin, diperlukan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, bantuan modal usaha, sertifikasi kompetensi, dan program magang yang melibatkan dunia industri. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin sehingga mereka dapat bekerja secara produktif atau membuka usaha sendiri, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penurunan tingkat pengangguran terbuka.
2. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan alokasi belanja modal sebagai

strategi percepatan pembangunan daerah. Peningkatan ini perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur ekonomi, pemberian insentif kepada investor di sektor strategis, dan pengembangan kawasan ekonomi unggulan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat membuka sektor ekonomi potensial, mendorong wirausaha, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal.

3. Diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, pelatihan vokasional bagi usia produktif, fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja, serta kerja sama dengan dunia industri melalui program magang. Pengembangan kewirausahaan berkelanjutan dan pendampingan usaha juga perlu dilakukan untuk mendorong terciptanya pelaku usaha baru. Seluruh program dan kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta secara langsung menurunkan angka pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.